

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1133 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK**

(Studi Kasus PT. PUTRA BUNGSU ABADI)



Disusun Oleh :

WENI SUSANTI

NIM : 02115043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2019

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1133 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA
SEPIHAK**

(Studi Kasus : PT. PUTRA BUNGSU ABADI)

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



Disusun Oleh :

WENI SUSANTI

NIM : 02115043

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1133 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA
SEPIHAK**

(Studi Kasus : PT. PUTRA BUNGSU ABADI)

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

PRO PATRIA

Diajukan Oleh :

WENI SUSANTI

NIM : 02115043

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi Ilmu

Hukum


Soemali, S.H., M.H.

NIDN : 0722026001



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

NIDN : 0713056101

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA 30 JULI 2019

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

Dosen Pembimbing :



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

Bambang Arwanto, S.H., M.H.
NIDN : 0713056101

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 22 Agustus 2019

Oleh Dosen Pembimbing :



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

NIDN : 0713056101

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 22 Agustus 2019.

TIM PENGUJI

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

KETUA



SOEMALI, S.H., M.H.

SEKRETARIS



ANDI PONTJO WIYONO, S.H., M.H.

ANGGOTA



SKRIPSI

PADA TANGGAL : 22 Agustus 2019



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weni Susanti

Nim : 02115043

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 JULI 2019

Yang membuat pernyataan



WENI SUSANTI

ABSTRAK

Setiap manusia ingin hidup sejahtera. Untuk memenuhi hidup sejahtera, untuk memenuhinya manusia melakukannya dengan bekerja. Setiap manusia yang bekerja terikat dengan hubungan kerja dan tidak terikat hubungan kerja. penelitian dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus : PT. Putra Bungsu Abadi)”, memiliki rumusan masalah apa syarat-syarat pengakhiran perjanjian hubungan kerja di Perusahaan, dan apakah Putusan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis syarat-syarat pengakhiran hubungan kerja di Perusahaan, dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena yang menjadi fokus penelitiannya adalah kegiatan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan hukum. Adapun sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan, kemudian dikelola dengan cara mengidentifikasi, memilah, dan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan masalah dan materi yang diteliti dan dianalisis. Landasan teori yang digunakan adalah pemutusan hubungan kerja dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa syarat terjadinya pengakhiran dan/atau pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha secara sepihak harus dilakukan dengan mendasarkan bukti yang sah dan valid. Dalam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT. Putra Bungsu Abadi, akibat para pekerja/buruh nya tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) hari, yang oleh hakim pengadilan hubungan industrial Manokwari dikategorikan mengundurkan diri atau mangkir, dalam menerapkan hukum dianggap salah oleh Mahkamah Agung karena pengusaha PT. Putra Bungsu Abadi dalam memutus sepihak para pekerjanya tidak pernah atau belum pernah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, sehingga tidak dapat dikatakan mengundurkan diri atau mangkir. Rasio decedendi putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Analisis putusan, Mahkamah Agung, penelitian

ABSTRACT

Every human being wants to live well. To meet the needs of a prosperous life, to fulfill it humans do it by working. 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 Concerning Termination of Unilateral Employment (Case Study: PT. Putra Bungsu Abadi) ", has the formulation of the problem of what are the conditions for terminating the employment relationship agreement in the company, and whether the Supreme Court's Decision in the Supreme Court's Decision No. 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 complies with the requested legislation. The purpose of this study is to study, evaluate, and analyze the terms of termination of employment relations in the Company, and the decision of the judge in the decision of the Supreme Court Number 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018.

This study uses a normative legal research method, because the focus of the research is the activity of studying the unity of invitations that apply to legal issues. Legal research sources used are primary legal materials, secondary legal materials. Legal materials are collected, then managed by organizing, sorting, and classifying legal materials according to the problems and materials discussed and analyzed. The theoretical basis used is termination of employment and the decision of the Supreme Court Number 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018.

Based on the data analysis, the conclusions that need to be made and / or work decisions made by unilateral employers must be based on valid and valid evidence. In terminating the unilateral work relationship conducted by PT. Putra Bungsu Abadi, the workers / laborers did not come to work within 5 (five) days, which by the Manokwari Industrial Relations Court judge was categorized as resigning or being absent, according to the law requested by the Supreme Court because the entrepreneur PT. Putra Bungsu Abadi in unilaterally deciding his workers never or never gave the first, second, and third approval letters fully approved, so that it could not be said of resigning or being absent. The ratio of decedendi to the decision of the Supreme Court is based on the provisions of Article 161 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower.

Keywords: *Decision analysis, Supreme Court, research*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Penjelasan Judul.....	5
1.3. Alasan Pemilihan Judul	7
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1 Tipe Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Masalah	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II SYARAT-SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN

2.1. Pengertian Hubungan Kerja	15
2.2. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan	27
2.3. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	31
2.4. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	32
2.5. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan.....	34

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018

3.1. Prinsip Keadilan dalam Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia	38
3.2. Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018	41

3.3. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018	47
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



KESIMPULAN

1. Syarat terjadinya pengakhiran dan/atau pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha secara sepihak harus dilakukan dengan mendasarkan bukti yang sah dan valid. Dalam hal pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja secara sepihak karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
2. Dalam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT. .Putra Bungsu Abadi, akibat para pekerja/buruhnya tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) hari, yang oleh hakim pengadilan hubungan industrial Manokwari dikategorikan sebagai mengundurkan diri atau mangkir. Putusan hakim pengadilan hubungan industrial tersebut oleh Mahkamah Agung dianggap salah dalam menerapkan hukum, karena pengusaha PT. Putra Bungsu Abadi dalam memutus sepihak para pekerjanya tidak pernah atau belum pernah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai mengundurkan diri atau mangkir. Rasio decedendi putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mendasarkan pada

ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Agusmindah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2002
- Ahmad Rizki Sridadi. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Empat Dua Media. Malang. 2016
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Edisi 1. Cetakan 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Budi Santoso. *Hukum Ketenagakerjaan : Perjanjian Kerja Bersama*. Universitas Brawijaya Press. Malang. 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Balai Pustaka. Jakarta. 1991
- Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuan*. Cet V Djambatan. Jakarta. 1983
- Koko Kosidin. *Perjanjian Kerja. Perjanjian Perburuhan. Peraturan Perusahaan*. Mandar Maju. Bandung. 1999
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2003
- Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1988
- Mariam Darus Badrulzaman. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni. Bandung. 1996
- N.E Algra. et.al. *Kamus Istilah Hukum. Fockema Andrea. Belanda-Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta. 1983
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2017
- Rachmad Syafa'at. *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya : Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi*. In-Trans Publishing. Malang. 2008
- Sayid Mohammad Rifqi Noval. *Hukum Ketenagakerjaan*. Refika Aditama. Bandung. 2017

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1977

Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2011

Tasrif. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. Abadin. Jakarta. 1987

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Jurnal

Sudibyo Aji Narendra Buwana, Mario Septian Adi Putra, *IMPLEMENTASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PEKERJA STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PT X DI KOTA MALANG*, Jurnal Studi Manajemen Vol. 9. No. 2, Oktober 2015